



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAPORAN APLIKASI SISTEM PEMANTAUAN
DAN EVALUASI KINERJA TERPADU DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka perwujudan *good governance*;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan program dan kegiatan melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, dipandang perlu membentuk Tim Pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Tim Pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1963);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 669), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG TIM PELAPORAN APLIKASI SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TERPADU DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Tim Pelaporan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Pelaporan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah

memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggungjawab dan Pelaksana dalam pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021.

B. Penanggung Jawab

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021.

C. Pelaksana, terdiri atas:

1. Ketua

a. mengoordinasikan pelaksanaan pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021; dan

b. menyampaikan pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021 kepada Penanggung Jawab.

2. Petugas Pelaporan

a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran;

b. mengumpulkan data dan informasi yang

- diperlukan dalam pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran berupa realisasi keuangan dan perkembangan atau laporan kegiatan per bulan;
- c. melakukan input data, informasi dan pelaporan melalui Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran setiap bulan/triwulan/ tahunan;
 - d. mengikuti Bimbingan Teknis/Peningkatan Kapasitas dan/atau Verifikasi Pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - e. mendokumentasikan data, informasi serta pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran masing-masing Unit Kerja.

3. Verifikatur

- a. melakukan verifikasi pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran setiap 3 (tiga) bulan;
- b. mendokumentasikan data, informasi serta pelaporan Aplikasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran; dan
- c. menyampaikan pelaksanaan verifikasi kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim pelaporan dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya informasi dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Penanggung Jawab Tim Pelaporan menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KELIMA : Masa kerja Tim Pelaporan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAPORAN APLIKASI SISTEM
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
TERPADU DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
TAHUN 2021

TIM PELAPORAN APLIKASI SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
TERPADU DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
TAHUN 2021

A. PENGARAH

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

B. PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

C. PELAKSANA

No	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Raden Tomi Supratomo, Perencana Ahli Madya selaku Koordinator Program	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Ketua
2.	Nikki Yunio	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan	Petugas Pelaporan

No	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Ruang Laut	
3.	Kristika Sari	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Petugas Pelaporan
4.	Tri Yuliandini	Direktorat Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	Petugas Pelaporan
5.	Mikha Hasudungan	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Petugas Pelaporan
6.	Ermin Nurman	Direktorat Jasa Kelautan	Petugas Pelaporan
7.	Rizka Dzulfikar	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	Petugas Pelaporan
8.	Danar Linsa Setiawati	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	Petugas Pelaporan
9.	Arrizal Khakim	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	Petugas Pelaporan
10.	Ahmad Junaedy	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	Petugas Pelaporan
11.	Muhammad Al Rizky Ratno Budiarto	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	Petugas Pelaporan
12.	Fahrur Rozi	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan	Petugas Pelaporan

No	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Laut Padang	
13.	Harry Farhat	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Petugas Pelaporan
14.	Sumiharjon Simbolon	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	Petugas Pelaporan
15.	Ari Wibowo. S	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Petugas Pelaporan
16.	Achmad Yusuf Subiyakto	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Petugas Pelaporan
17.	Dwi Septi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Yogyakarta	Petugas Pelaporan
18.	Ahmad Saddam Husein	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Petugas Pelaporan
19.	Hasan Harahap	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh	Petugas Pelaporan
20.	Rudolf Yamasoni Ompusunggu	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	Petugas Pelaporan
21.	Eka Putra	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Petugas Pelaporan

No	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
22.	Marta Lestina	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Petugas Pelaporan
23.	Evi Marianti	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	Petugas Pelaporan
24.	Indah Rikawati	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	Petugas Pelaporan
25.	Mhd. Irwansyah Pohan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Petugas Pelaporan
26.	Karlina Putri Diani	Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	Petugas Pelaporan
27.	Budi Setiawan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	Petugas Pelaporan
28.	Muhammad Riz'an	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Petugas Pelaporan
29.	Hasni Hazami	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	Petugas Pelaporan
30.	Frits Tatangindatu	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	Petugas Pelaporan
31.	Ilfan	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah	Petugas Pelaporan

No	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
32.	Amran Djafar	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan	Petugas Pelaporan
33.	Fatmawati. D	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara	Petugas Pelaporan
34.	Juanita Sopaheluwakan	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku	Petugas Pelaporan
35.	I Gede Wina Parmana Putra	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Petugas Pelaporan
36.	Vicky Sanofa	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Petugas Pelaporan
37.	Marce. F. Koby	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Petugas Pelaporan
38.	Yansen F. Sinaga	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Papua	Petugas Pelaporan
39.	Arief Samsul Bahrie	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	Petugas Pelaporan
40.	Alimin	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Petugas Pelaporan
41.	Sulistiyawan	Dinas Kelautan dan	Petugas Pelaporan

No	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Perikanan Provinsi Banten	
42.	Ardi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Petugas Pelaporan
43.	Fadli Efendi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	Petugas Pelaporan
44.	Robi Rafika	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Petugas Pelaporan
45.	Immanuel Keymans	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat	Petugas Pelaporan
46.	Zulkifli	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	Petugas Pelaporan
47.	Syilfia Jannatul Firdausy	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	Petugas Pelaporan
48.	Soleh	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu	Petugas Pelaporan
49.	Ali Khamdan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak	Petugas Pelaporan

No	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
50.	Imam Tabroni	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes	Petugas Pelaporan
51.	Ahmad Mukhlisin	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati	Petugas Pelaporan
52.	Indriyani Wahyuningrum	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara	Petugas Pelaporan
53.	Abdul Jabbar	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik	Petugas Pelaporan
54.	Rachmad Saleh	Dinas Perikanan Kabupaten Sampang	Petugas Pelaporan
55.	Lutfi Rif'ai Ardiyan	Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelaporan
56.	Abdullah Haqiqi Hariyanto	Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep	Petugas Pelaporan
57.	Siti Rahmah	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar	Petugas Pelaporan
58.	M. Nasir	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara	Petugas Pelaporan
59.	Andi Ahmad Tahir	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	Petugas Pelaporan

No	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Pangkajene Kepulauan	
60.	Soni Zohrina	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	Petugas Pelaporan
61.	M. Arfian Pilar	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima	Petugas Pelaporan
62.	Nawaratul Aini	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat	Petugas Pelaporan
63.	Jande O.L Padamabi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang	Petugas Pelaporan
64.	Mohammad Alfarra	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang	Petugas Pelaporan
65.	Riyanto Dai	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pohuwato	Petugas Pelaporan
66.	Anita Setianingsih, Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Verifikatur
67.	Anton S. Nugroho, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Verifikatur

No	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
68.	Milka Primatianti, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Verifikatur
69.	Enny Syafrida M, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Verifikatur
70.	Chairiyanti, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Verifikatur
71.	Muhajah Babny Muslim, Perencana Pertama	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Verifikatur

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,

Hendra Yusran Siry

ttd.

TB. HAERU RAHAYU